



RENCANA KERJA

Tahun 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. TRUNOJOYO 12A Telp. (0353) 881259
BOJONEGORO, Kode Pos 62111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/30 /KEP/412.303/2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 —2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Kepala Bidang agar menjadikan Rencana Kerja ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan pada tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO



LULUK ALIFAH
Pembina Tk. I

NIP. 19691128 200312 2 008

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	38
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selaku SKPD maupun SKPKD	38
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024.....	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
2.6 Penyelarasan Program dan Kegiatan dengan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan.....	52
2.7 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Antar Perangkat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran Sesuai dengan Kewenangan dan Sinegritas Pelaksanaan.....	53
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	54
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	54
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja BPKAD	58
3.3 Program dan Kegiatan	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	63
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	63
4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah Kabupaten Bojonegoro	72
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan	73
5.2 Rencana Tindak lanjut	73

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menjadi bagian dari dokumen perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode tersebut.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 memuat usulan program, kegiatan berserta subkegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan DPA BPKAD Tahun Anggaran 2024. Serta menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat dicapai sesuai harapan.

Bojonegoro, 11 Agustus 2023
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



LULUK ALIFAH
Peminda Tingkat I
NIP.19691128 200312 2 008

**BAB I
PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Dokumen Rencana Kerja ini memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro juga memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintah, berkaitan dengan hal tersebut dalam merumuskan Renja harus dilaksanakan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan Undang-undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun ketentuan tersebut diatas berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, hasil pengkajian terhadap kondisi eksisting BPKAD, evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD tahun-tahun sebelumnya serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPKAD Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja BPKAD Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKAD Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1050 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 ;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro antara lain :

- a. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

Tujuan antara lain :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Bojonegoro;
- c. Sebagai Upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKAD Kabupaten Bojonegoro;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD aserta penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran

yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rencana kerja prioritas yang akan dilaksanakan yang dijabarkan dalam unsur penunjang urusan pemerintahan

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindaklanjut.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan capaian Renstra SKPD**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator capaian program/keluaran kegiatan dengan realisasi pada tahun lalu dan target pada tahun berjalan.

Pada Tahun 2022 target kinerja mencapai 100% sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja . Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kerja pada Program/Keluaran Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam menunjang kinerja BPKAD secara keseluruhan.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah adalah tersusunnya dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.781.838,- terealisasi Rp 7.079.360,- atau 80,61% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD adalah tersusunnya dokumen RKA dengan pagu anggaran

- sebesar Rp. 6.242.688,- terealisasi Rp 5.463.850,- atau 87,52% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
Pencapaian kinerja sub kegiatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD adalah tersusunnya dokumen Perubahan RKA dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.668.953,- terealisasi Rp 5.973.400,- atau 89,57% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
Pencapaian kinerja sub kegiatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD adalah tersusunnya dokumen DPA BPKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.441.638,- terealisasi Rp 5.614.450,- atau 87,16% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
Pencapaian kinerja sub kegiatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD adalah tersusunnya dokumen DPA Perubahan BPKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.714.765,- terealisasi Rp 6.099.900,- atau 90,84% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pencapaian kinerja sub kegiatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Kinerja berupa LKPD, LPPD dan LKJip dengan pagu anggaran sebesar Rp. 116.632.355,- terealisasi Rp 109.946.050,- atau 94,27% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja sub kegiatan kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja BPKAD setiap bulannya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 132.106.895,- terealisasi Rp 130.679.906,- atau 98,92% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN di BPKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.522.837.495,- terealisasi Rp 5.017.350.034,- atau 90,85% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah terpenuhinya administrasi pengelolaan dan pelaksanaan tugas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 710.510.000,- terealisasi Rp. 667.657.237,- atau 93,97% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan baik untuk internal BPKAD maupun terkait belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.573.805,- terealisasi Rp 3.301.200,- atau 92,37% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah tersusunnya dokumen laporan keuangan

SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.427.520,- terealisasi Rp 11.895.050,- atau 95,72% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah tersusunya dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.476.018,- terealisasi Rp 12.105.000,- atau 97,03% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan adalah tersusunya dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan baik pemeriksaan/audit internal maupun eksternal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.234.305,- terealisasi Rp 2.121.500,- atau 94,95% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD adalah tersusunya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.401.965,- terealisasi Rp 11.915.450,- atau 96,08% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran adalah tersusunya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.092.470,- terealisasi

Rp 1.929.400,-atau 92,21% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Pencapaian kinerja sub Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai adalah tersusunnya dokumen penilaian kinerja pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.500.000,- terealisasi Rp 2.725.750,-atau 15,58% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.344.360,- terealisasi Rp 10.279.600,-atau 99,37% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.527.122,- terealisasi Rp 55.490.000,-atau 96,46% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah tersedianya Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.242.500,- terealisasi Rp 78.465.000,-atau 97,78% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

- dan Penggandaan adalah tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.211.750,- terealisasi Rp 12.916.500,- atau 79,67% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.130.000,- terealisasi Rp 3.250.000,- atau 63,35% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
 - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah terlaksananya penataan kearsipan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 499.282.00,- terealisasi Rp 4.958.000,- atau 99,30% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah terlaksananya Penatausahaan Surat Menyurat pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.236.585,- terealisasi Rp 24.980.600,- atau 91,72% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.295.000,- terealisasi Rp 50.172.450,- atau 94,14% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor adalah tersedianya Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 193.477.800,- terealisasi Rp 144.659.427,6,-atau 74,77% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 297.402.500,- terealisasi Rp 221.816.500,-atau 74,58% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.247.500,- terealisasi Rp 27.475.000,-atau 97,27% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 102.175.350,- terealisasi Rp 101.621.776,-atau 99,46% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah****a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;**

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS adalah terlaksananya tersusunnya dokumen KUA dan PPAS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.501.100,- terealisasi Rp 54.944.732,- atau 95,55% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS adalah tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.451.900,- terealisasi Rp 55.439.232,- atau 94,85% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD adalah terlaksananya desk verifikasi dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 46.435.400,- terealisasi Rp 38.712.132,- atau 83,37% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD adalah terlaksananya desk verifikasi dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 46.435.400,- terealisasi Rp 38.800.332,- atau 83,56% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan

dan Verifikasi DPA-SKPD adalah terverifikasinya dokumen DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.484.400,- terealisasi Rp 1.443.000,- atau 97,21% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD adalah terverifikasinya dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.484.400,- terealisasi Rp 1.355.400,- atau 91,31% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD adalah tersusunnya draft Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 167.351.700,- terealisasi Rp 152.413.200,- atau 91,07% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD adalah tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.852.800,- terealisasi Rp 235.252.088,28 atau 93,78% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang

Anggaran;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran adalah terlaksananya Rapat Koordinasi TAPD untuk pembahasan kebijakan penganggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.719.469.100,- terealisasi Rp 785.193.858,- atau 45,66% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan adalah terlaksananya koordinasi dan tersedianya dokumen rencana Anggaran Pendapatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.350.550,- terealisasi Rp 1.833.550,- atau 78,01% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah adalah terlaksananya Koordinasi dan tersusunnya dokumen rencana Anggaran Belanja Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.764.800,- terealisasi Rp 2.764.800,- atau 100% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

l. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan adalah terlaksananya Koordinasi dan tersusunnya rencana Anggaran Pembiayaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 796.000,- terealisasi Rp 796.000,- atau 100% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

m. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya pembinaan penganggaran ke pengelola

keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.623.750,- terealisasi Rp 38.454.650,- atau 90,22% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah adalah tersusunya laporan posisi kas daerah harian dan bulanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 188.585.450,- terealisasi Rp 178.069.570,- atau 94,42% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah adalah tersusunnya dokumen anggaran kas SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 129.957.050,- terealisasi Rp 112.521.774,72 atau 86,58% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya adalah tersusunnya laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 163.414.740,- terealisasi Rp 135.275.396,- atau 82,78% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

d. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan

Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan pagu anggaran sebesar Rp. 262.216.000,- terealisasi Rp 250.430.646,60 atau 95,51% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Laporan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.786.010,- terealisasi Rp 88.408.854,- atau 85,18% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

- f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pengelola keuangan di SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 262.216.000,- terealisasi Rp 179.179.946,- atau 86,18% dengan tingkat

capaian kinerja 100%;

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;

Pencapaian kinerja sub Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah adalah tersedianya dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.540.400,- terealisasi Rp 9.619.600,- atau 83,36% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;

Pencapaian kinerja sub Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban adalah terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.696.000,- terealisasi Rp 52.563.000,- atau 97,89% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran;

Pencapaian kinerja sub Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran adalah terlaksananya Koordinasi dengan SKPD dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 177.983.720,- terealisasi Rp 86.417.750,- atau 48,55% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
Pencapaian kinerja sub Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.336.250,- terealisasi Rp 2.000.000,- atau 23,99% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
Pencapaian kinerja sub Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 228.209.847,- terealisasi Rp 194.125.700,- atau 83,56% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- f. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
Pencapaian kinerja sub Penyusunan Kegiatan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah terlaksananya koordinasi dalam rangka Penyusunan

Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.881.150,- terealisasi Rp 6.971.000,- atau 54,12% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

- g. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah adalah terlaksananya Koordinasi dengan Tim dan pihak-pihak terkait serta sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.131.096.887,- terealisasi Rp116.499.788,- atau 88,87% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- h. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah terlaksananya Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.852.350,- terealisasi Rp 32.347.000,- atau 92,81% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- i. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah tersusunnya dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.333.900,- terealisasi Rp 32.741.868,56 atau 90,11%

- dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- j. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah terlaksananya Pencapaian kinerja sub kegiatan tersusunnya draft peraturan tentang Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah terlaksananya Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.452.956,- terealisasi Rp 38.552.898,72 atau 74,16% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- k. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota;
Pencapaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pengelola keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.452.956,- terealisasi Rp 38.552.898,72 atau 77,96% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- l. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota;
Pencapaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota kepada pengelola BLUD adalah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.569.900,- terealisasi Rp 10.995.100 atau 87,47% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- m. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan

Pemerintahan Daerah;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah adalah tersusunnya laporan statistik Keuangan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.721.178,- terealisasi Rp 8.307.100,- atau 77,48% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Analisis Investasi Pemerintah Daerah;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah adalah tersusunnya dokumen analisis Investasi Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 716.680.950,- terealisasi Rp 649.916.792,- atau 90,68% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan adalah tersalurkannya Bantuan Keuangan sesuai ketentuan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.393.202.538.169,- terealisasi Rp 1.32.901.239.1719,- atau 95,39% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak adalah terealisasinya Dana Darurat dan Mendesak sesuai ketentuan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 71.041.491.483,- terealisasi Rp 34.282.435.218,- atau 83,56% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota adalah tersalurkannya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota kepada desa dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 22.639.855.274,- terealisasi Rp 21.197.184.063,- atau 93,63% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah

a. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah adalah tersusunnya dokumen Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 178.715.200,- terealisasi Rp 175.207.474,56,- atau 98,04% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

b. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah adalah terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 497.284.800,- terealisasi Rp 438.343.573,12 atau 88,15% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota ke SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi Rp 57.312.500 atau 95,52% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**1. Pengelolaan Barang Milik Daerah****a. Penyusunan Standar Harga;**

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Standar Harga adalah tersusunnya dokumen Standar Harga dengan pagu anggaran Rp. 456.841.625,- terealisasi Rp. 429.246.030,- 93,96% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah tersusunnya dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 73.161.970,- terealisasi Rp 61.980.050 atau 84,72% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah tersusunnya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 91.416.600,- terealisasi Rp 84.455.780,- atau 92,39% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah tersusunnya draft Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 137.750.000,- terealisasi Rp 136.036.550 atau 98,76% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah tersusunnya laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 216.511.855,- terealisasi Rp 188.180.741,6 atau 86,91% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
Pencapaian kinerja sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah terlaksananya kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.500.000,- terealisasi Rp 43.890.000,- atau 83,56% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- g. Pengamanan Barang Milik Daerah;
Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah adalah terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah dengan prioritas kegiatan untuk sertifikasi tanah milik pemerintah daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 1.071.850.000,- terealisasi Rp 1.018.241.632,84,- atau 95,00% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- h. Penilaian Barang Milik Daerah;
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah adalah tersusunnya dokumen Penilaian Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 142.500.000,- terealisasi Rp 140.301.540,- atau 98,46% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- i. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.750.000,- terealisasi Rp 23.635.450,- atau 99,52%

dengan tingkat capaian kinerja 100%;

- j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
Pencapaian kinerja sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah adalah terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 285.083.500,- terealisasi Rp 250.092.744,2,- atau 87,73% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- k. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
Pencapaian kinerja sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah adalah terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan pengurus barang SKPD, pagu anggaran sebesar Rp. 112.574.905,- terealisasi Rp 103.250.641,- atau 91,72% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- l. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah adalah tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.474.750,- terealisasi Rp 20.828.650,- atau 96,99% dengan tingkat capaian kinerja 100%;
- m. Pembinaan Pengelolaan Barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pencapaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pengurus barang dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- terealisasi Rp 82.486.236,- atau 86,83% dengan tingkat capaian kinerja 100%;

Adapun Fator pendorong dan penghambat dalam tingkat capaian kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :
 - Penetapan APBD Tepat Waktu sehingga pelaksanaan kegiatan dapat segera dilaksanakan mulai awal tahun anggaran;
 - Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dan seluruh SDM yang ada di BPKAD untuk melaksanakan kinerja sesuai perencanaan yang ditentukan;
 - Adanya koordinasi dengan SKPD terkait yang dilakukan secara berkesinambungan;
2. Faktor Penghambat :
 - Terjadinya perubahan perundang-undangan pada saat kegiatan telah dilaksanakan;
 - Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
3. Kebijakan yang diambil dalam mengatasi faktor penghambat :
 - Menyusun perencanaan secara tepat;
 - Memprioritaskan program/kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tugas sasaran kinerja perangkat daerah;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala;

Tabel 2.1
Format TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Bojonegoro

NAMA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Targert dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5										
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02									
	BIDANG URUSAN KEUANGAN									
5	02	01			100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan								
5	02	01	2.01		7	7	7	100	7	100
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun								
5	02	01	2.01.01		1	1	1	100	1	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun								
5	02	01	2.01.02		11	11	11	100	11	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang tersusun								
5	02	01	2.01.03		11	11	11	100	11	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang tersusun								
5	02	01	2.01.04		11	11	11	100	11	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersusun								
5	02	01	2.01.05		11	11	11	100	11	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang tersusun								
5	02	01	2.01.06		3	3	3	100	3	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
5	02	01	2.01.07		12	12	12	100	12	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun								
5	02	01	2.02		8	8	8	100	8	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi								
5	02	01	2.02.01		12	12	12	100	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN								
5	02	01	2.02.02		12	12	12	100	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan pengelolaan keuangan yang terpenuhi								
5	02	01	2.02.03		100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase SPP/SPM yang diverifikasi								
5	02	01	2.02.04		1	1	1	100	1	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan yang disusun								
5	02	01	2.02.05		1	1	1	100	1	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Laporan akhir tahun yang								

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	disusun								
5	02	01	2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan yang disusun	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	01	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	01	2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	01	2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik yang dilaksanakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan yang	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pelaksanaan penataan arsip	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan yang dilaksanakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan mesin yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	01	2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase SKPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan perencanaan	100	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen	100	100	100	100	100	100	100	100

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

					anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan								
5	02	02	2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD menyelesaikan dokumen RKA tepat waktu	74	74	74	74	100	74	100	100
5	02	02	2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang menyusun DPA tepat waktu	74	74	74	74	100	74	100	100
5	02	02	2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	74	74	74	74	100	74	100	100
5	02	02	2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	74	74	74	74	100	74	100	100
5	02	02	2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	240	240	240	240	100	240	100	100
5	02	02	2.01.08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	480	480	480	480	100	480	100	100
5	02	02	2.01.09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun tepat waktu	24	24	24	24	100	24	100	100
5	02	02	2.01.10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang dilaksanakan	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.01.11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.01.12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi erencanaan Anggaran Pembiayaan yang dilaksanakan	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasubag prolap/ PPTK/KPA yang dibina tentang penganggaran Daerah	74	74	74	74	100	74	100	100
5	02	02	2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi kebutuhan kas yang difasilitasi	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah data silpa berdasarkan sumber dana yang dilaporkan tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.02.03	Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD SKPD yang disiapkan tepat waktu	148	148	148	148	100	148	100	100
5	02	02	2.02.04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah kajian Pembiayaan Daerah yang disusun	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah laporan Penatausahaan Dana Transfer lainnya tepat waktu	12	12	12	12	100	12	100	100

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
5	02	02	2.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan transaksi non tunai	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah tepat waktu	12	12	12	12	100	12	100	100
5	02	02	2.02.08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan Penatausahaan Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.02.09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi data pembayaran pajak pusat	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.02.10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang di terbitkan tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.02.11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan Penatausahaan Keuangan kepada Bendahara Pengeluaran	24	24	24	24	100	24	100	100
5	02	02	2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.03.02	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah rekonsiliasi dan verifikasi Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan dan Semesteran yang disusun tepat waktu	3	3	3	3	100	3	100	100
5	02	02	2.03.04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Keuangan Konsolidasi SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah dokumen Rancangan PERDA dan Rancangan PERBUP Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
5	02	02	2.03.06	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.03.07	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Prosentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang diselesaikan tepat waktu	70	70	70	70	100	70	100	100
5	02	02	2.03.08	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	02	2.03.09	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.03.10	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.03.11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan	4	4	4	4	100	4	100	100
5	02	02	2.03.12	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten yang dilaksanakan	4	4	4	4	100	4	100	100
5	02	02	2.03.13	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah yang disusun tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.04.02	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen analisis investasi yang disusun tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	02	2.04.08	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase bantuan Keuangan yang disalurkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.04.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	persentase Belanja Tidak Terduga yang disalurkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.04.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	persentase Belanja Transfer yang disalurkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.05.01	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan data keuangan yang disusun tepat waktu	8	8	8	8	100	8	100	100
5	02	02	2.05.02	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang diimplementasikan dan dilaksanakan pemeliharaan	8	8	8	8	100	8	100	100
5	02	02	2.05.03	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan peningkatan penerapan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	03	2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang	Persentase SKPD yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Milik Daerah	pengelolaan barang milik daerahnya								
5	02	03	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	03	2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah okumen standar satuan barang dan kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	03	2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	03	2.01.04	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kebijakan barang milik daerah yang sesuai ketentuan	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	03	2.01.05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pedoman Penataan barang milik daerah yang ditetapkan tepat waktu	1	1	1	1	100	1	100	100
5	02	03	2.01.06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	persentase BMD yang diinventarisir tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	03	2.01.07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Pengajuan Sertifikasi Tanah Milik Pemda ke BPN yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	03	2.01.08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dinilai tepat waktu	200	200	200	200	100	200	100	100
5	02	03	2.01.09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pengelolaannya	1000	1000	1000	1000	100	1000	100	100
5	02	03	2.01.10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtanganan, dimusnahkan dan dihapus	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	03	2.01.11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	03	2.01.12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	100	100
5	02	03	2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan BMD	2	2	2	2	100	2	100	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan kajian capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan BPKAD Bojonegoro

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Opini BPK		v	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
2	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan	v		90%	95%	100%	100%	90%	95%	100%	100%	Tercapai
3	Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP	v		75%	75%	80%	80%	75%	75%	80%	80%	Tercapai
4	Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	v		75%	75%	80%	80%	75%	75%	80%	80%	Tercapai
5	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	v		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	Tercapai
6	Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	v		90%	95%	100%	100%	90%	95%	100%	100%	Tercapai
7	Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti	v		45%	45%	50%	50%	45%	45%	50%	50%	Tercapai

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama seluruhnya tercapai mulai 100% (seratus persen) untuk Tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan juga tercapai 100% (seratus persen).

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD selaku SKPD maupun SKPKD.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Kabupaten Bojonegoro, didalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat isu-isu strategis dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan nilai yang wajar, sementara dalam pencatatan berdasarkan nilai perolehan/ kontrak
2. Belum dilengkapinya bukti kepemilikan barang milik daerah;
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
4. Untuk melakukan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah diperlukan data yang akurat terkait spesifikasi barang;
5. Penyusunan RKA - SKPD dan DPA- SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
6. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset;
6. Integrasi sistem antar pengelolaan keuangan dengan pengelolaan

aset (barang milik daerah) merupakan suatu yang menjadi sangat urgen dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

Rancangan Awal Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam dokumen Ranwal Renja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dan sasaran, antara kebijakan dengan program, serta kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 2.3
Review terhadap rancangan akhir RKPD tahun 2024

KODE	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu indikatif	Program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5											
5	02										
5	02	01									
5	02	01	2.01								
5	02	01	2.01.01								
5	02	01	2.01.02								
5	02	01	2.01.03								
5	02	01	2.01.04								
5	02	01	2.01.05								
5	02	01	2.01.06								
5	02	01	2.01.0								
5	02	01	2.02								

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	01	2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bojonegoro	tercukupi Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	7,797,158,406	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bojonegoro	tercukupi Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	7,797,158,406	
5	02	01	2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bojonegoro	Jumlah penyediaan pengelolaan keuangan yang terpenuhi	12	481,164,000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bojonegoro	Jumlah penyediaan pengelolaan keuangan yang terpenuhi	12	481,164,000	
5	02	01	2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bojonegoro	Persentase SPP/SPM yang diverifikasi	100	3.323.590	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bojonegoro	Persentase SPP/SPM yang diverifikasi	100	3.323.590	
5	02	01	2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bojonegoro	Jumlah Laporan yang disusun	1	2.651.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bojonegoro	Jumlah Laporan yang disusun	1	2.651.000	
5	02	01	2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bojonegoro	Jumlah Laporan akhir tahun yang disusun	1	2.701.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bojonegoro	Jumlah Laporan akhir tahun yang disusun	1	2.701.000	
5	02	01	2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bojonegoro	Jumlah Laporan yang disusun	1	1.984.300	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bojonegoro	Jumlah Laporan yang disusun	1	1.984.300	
5	02	01	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bojonegoro	Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1	11.651.950	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bojonegoro	Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1	11.651.950	
5	02	01	2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bojonegoro	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	2	1.562.470	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bojonegoro	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	2	1.562.470	
5	02	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Bojonegoro	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	1	278,229,900	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Bojonegoro	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	1	278,229,900	
5	02	01	2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bojonegoro	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun	1	278,229,900	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bojonegoro	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun	1	278,229,900	
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Bojonegoro	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	12	207.416.110	Administrasi Umum Perangkat daerah	Bojonegoro	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	12	207.416.110	
5	02	01	2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bojonegoro	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik yang dilaksanakan	12	10,344,360	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bojonegoro	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik yang dilaksanakan	12	10,344,360	
5	02	01	2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bojonegoro	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	129,341,960	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bojonegoro	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	129,341,960	
5	02	01	2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bojonegoro	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12	25,507,090	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bojonegoro	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12	25,507,090	
5	02	01	2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bojonegoro	jumlah penyediaan barang cetakan yang	12	8.962.700	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bojonegoro	jumlah penyediaan barang cetakan yang	12	8.962.700	

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	01	2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bojonegoro	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12	5.130.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bojonegoro	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12	5.130.000	
5	02	01	2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bojonegoro	Jumlah pelaksanaan penataan arsip	12	28.130.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bojonegoro	Jumlah pelaksanaan penataan arsip	12	28.130.000	
5	02	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan yang dilaksanakan	12	609,461,485	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan yang dilaksanakan	12	609,461,485	
5	02	01	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bojonegoro	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	12	26,346,585	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bojonegoro	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	12	26,346,585	
5	02	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bojonegoro	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	140,056,800	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bojonegoro	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	140,056,800	
5	02	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bojonegoro	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	443,058,100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bojonegoro	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	443,058,100	
5	02	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	12	549,466,550	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	12	549,466,550	
5	02	01	2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bojonegoro	Jumlah jasa pemeliharaan yang disediakan	12	251,778,650	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bojonegoro	Jumlah jasa pemeliharaan yang disediakan	12	251,778,650	
5	02	01	2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bojonegoro	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan mesin yang disediakan	12	147,687,500	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bojonegoro	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan mesin yang disediakan	12	147,687,500	
5	02	01	2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bojonegoro	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor yang disediakan	12	150,000,400	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bojonegoro	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor yang disediakan	12	150,000,400	
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bojonegoro	Persentase SKPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	100	1,395,003,079,684	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bojonegoro	Persentase SKPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	100	1,395,003,079,684	
					Bojonegoro	Persentase penerbitan SP2D dalam 2 hari	100			Bojonegoro	Persentase penerbitan SP2D dalam 2 hari	100		
					Bojonegoro	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100			Bojonegoro	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100		
5	02	02	2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bojonegoro	Persentase SKPD yang menyusun rencana anggaran	100	1,530,647,450	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bojonegoro	Persentase SKPD yang menyusun rencana anggaran	100	1,530,647,450	

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

						daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan					daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan			
5	02	02	2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bojonegoro	Jumlah koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	2	60,327,100	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bojonegoro	Jumlah koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	2	60,327,100	
5	02	02	2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bojonegoro	Jumlah koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	2	45.518.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bojonegoro	Jumlah koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	2	45.518.600	
5	02	02	2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyelesaikan dokumen RKA tepat waktu	74	46.439.900	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyelesaikan dokumen RKA tepat waktu	74	46.439.900	
5	02	02	2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyelesaikan dokumen RKA tepat waktu	74	31.505.500	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyelesaikan dokumen RKA tepat waktu	74	31.505.500	
5	02	02	2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD yang menyusun DPA tepat waktu	74	10.189.400	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD yang menyusun DPA tepat waktu	74	10.189.400	
5	02	02	2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	74	10.189.400	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	74	10.189.400	
5	02	02	2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyusun Peraturan Daerah tentang DPA tepat waktu	74	192.571.700	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bojonegoro	Jumlah SKPD menyusun Peraturan Daerah tentang DPA tepat waktu	74	192.571.700	
5	02	02	2.01.08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	240	246.742.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	240	246.742.500	
5	02	02	2.01.09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bojonegoro	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun tepat waktu	24	810.469.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bojonegoro	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun tepat waktu	24	810.469.500	
5	02	02	2.01.10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bojonegoro	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan	2	2,624,200	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bojonegoro	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan	2	2,624,200	

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

						Pendapatan yang dilaksanakan					Pendapatan yang dilaksanakan			
5	02	02	2.01.11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bojonegoro	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan	2	3,727,550	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bojonegoro	Jumlah koordinasi Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan	2	3,727,550	
5	02	02	2.01.12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bojonegoro	Jumlah koordinasi erencanaan Anggaran Pembiayaan yang dilaksanakan	2	2,563,100	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bojonegoro	Jumlah koordinasi erencanaan Anggaran Pembiayaan yang dilaksanakan	2	2,563,100	
5	02	02	2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah Kasubag prolap/ PPTK/KPA yang dibina tentang penganggaran Daerah	74	67,779,000	Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah Kasubag prolap/ PPTK/KPA yang dibina tentang penganggaran Daerah	74	67,779,000	
5	02	02	2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bojonegoro	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	100	1,108,681,190	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bojonegoro	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	100	1,108,681,190	
5	02	02	2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bojonegoro	Jumlah rekonsiliasi kebutuhan kas yang difasilitasi	2	223,998,850	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bojonegoro	Jumlah rekonsiliasi kebutuhan kas yang difasilitasi	2	223,998,850	
5	02	02	2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Bojonegoro	Jumlah data silpa berdasarkan sumber dana yang dilaporkan tepat waktu	2		Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Bojonegoro	Jumlah data silpa berdasarkan sumber dana yang dilaporkan tepat waktu	2		
5	02	02	2.02.03	Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bojonegoro	Jumlah dokumen SPD SKPD yang disiapkan tepat waktu	148	82,294,000	Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bojonegoro	Jumlah dokumen SPD SKPD yang disiapkan tepat waktu	148	82,294,000	
5	02	02	2.02.04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bojonegoro	Jumlah kajian Pembiayaan Daerah yang disusun	1		Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bojonegoro	Jumlah kajian Pembiayaan Daerah yang disusun	1		
5	02	02	2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bojonegoro	Jumlah laporan Penatausahaan Dana Transfer lainnya tepat waktu	12	61.534.140	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bojonegoro	Jumlah laporan Penatausahaan Dana Transfer lainnya tepat waktu	12	61.534.140	
5	02	02	2.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan transaksi non tunai	1	229,769,680	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan transaksi non tunai	1	229,769,680	
5	02	02	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	Bojonegoro	Jumlah Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah tepat waktu	12	202.089.380	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	Bojonegoro	Jumlah Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah tepat waktu	12	202.089.380	

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Ketiga (PFK)					Ketiga (PFK)						
5	02	02	2.02.08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bojonegoro	Jumlah laporan Penatausahaan Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah tepat waktu	1		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bojonegoro	Jumlah laporan Penatausahaan Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah tepat waktu	1			
5	02	02	2.02.09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bojonegoro	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi data pembayaran pajak pusat	2		Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bojonegoro	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi data pembayaran pajak pusat	2			
5	02	02	2.02.10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bojonegoro	Jumlah dokumen petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang di terbitkan tepat waktu	1		Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bojonegoro	Jumlah dokumen petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang di terbitkan tepat waktu	1			
5	02	02	2.02.11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan Penatausahaan Keuangan kepada Bendahara Pengeluaran	24	308.995.140	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan Penatausahaan Keuangan kepada Bendahara Pengeluaran	24	308.995.140		
5	02	02	2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bojonegoro	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai ketentuan	100	757.517.403	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bojonegoro	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai ketentuan	100	757.517.403		
5	02	02	2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bojonegoro	Jumlah rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	125.743.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bojonegoro	Jumlah rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	125.743.000		
5	02	02	2.03.02	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Bojonegoro	Jumlah rekonsiliasi dan verifikasi Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	2	26.520.000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Bojonegoro	Jumlah rekonsiliasi dan verifikasi Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	2	26.520.000		
5	02	02	2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Bojonegoro	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan dan Semesteran yang disusun tepat waktu	3	48.583.400	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Bojonegoro	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan dan Semesteran yang disusun tepat waktu	3	48.583.400		
5	02	02	2.03.04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan	Bojonegoro	Jumlah dokumen Keuangan Konsolidasi SKPD	2	12.210.900	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan	Bojonegoro	Jumlah dokumen Keuangan Konsolidasi SKPD	2	12.210.900		

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Keuangan Pemerintah Daerah		BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu			Keuangan Pemerintah Daerah		BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu			
5	02	02	2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah dokumen Rancangan PERDA dan Rancangan PERBUP Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	2	316,020,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah dokumen Rancangan PERDA dan Rancangan PERBUP Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	2	316,020,000	
5	02	02	2.03.06	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bojonegoro	jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	1.235.400	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bojonegoro	jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	1.235.400	
5	02	02	2.03.07	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Bojonegoro	Prosentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang diselesaikan tepat waktu	70	119.401.900	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Bojonegoro	Prosentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang diselesaikan tepat waktu	70	119.401.900	
5	02	02	2.03.08	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	1.999.000	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	1.999.000	
5	02	02	2.03.09	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1	67.666.700	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1	67.666.700	
5	02	02	2.03.10	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1	8.334.103	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1	8.334.103	
5	02	02	2.03.11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	Bojonegoro	Jumlah Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan	4	27,052,000	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	Bojonegoro	Jumlah Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan	4	27,052,000	

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Kabupaten/Kota		Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan			Kabupaten/Kota		Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan			
5	02	02	2.03.12	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten yang dilaksanakan	4	1.252.000	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten yang dilaksanakan	4	1.252.000	
5	02	02	2.03.13	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah yang disusun tepat waktu	1	1.499.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	Jumlah Dokumen Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah yang disusun tepat waktu	1	1.499.000	
5	02	02	2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bojonegoro	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	100	1,390,856,513,141	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bojonegoro	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	100	1,390,856,513,141	
5	02	02	2.04.02	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen analisis investasi yang disusun tepat waktu	1	363,706,070	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen analisis investasi yang disusun tepat waktu	1	363,706,070	
5	02	02	2.04.08	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bojonegoro	persentase bantuan Keuangan yang disalurkan tepat waktu	100	1,284,962,078,440	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bojonegoro	persentase bantuan Keuangan yang disalurkan tepat waktu	100	1,284,962,078,440	
5	02	02	2.04.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bojonegoro	persentase Belanja Tidak Terduga yang disalurkan tepat waktu	100	81,053,054,670	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bojonegoro	persentase Belanja Tidak Terduga yang disalurkan tepat waktu	100	81,053,054,670	
5	02	02	2.04.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bojonegoro	persentase Belanja Transfer yang disalurkan tepat waktu	100	24,477,673,961	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bojonegoro	persentase Belanja Transfer yang disalurkan tepat waktu	100	24,477,673,961	
5	02	02	2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bojonegoro	prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	100	749,720,500	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bojonegoro	prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	100	749,720,500	
5	02	02	2.05.01	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen laporan data keuangan yang disusun tepat waktu	8	236,500,000	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen laporan data keuangan yang disusun tepat waktu	8	236,500,000	
5	02	02	2.05.02	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Bojonegoro	Jumlah sistem informasi keuangan yang diimplementasikan dan dilaksanakan pemeliharaan	8	267.578.500	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Bojonegoro	Jumlah sistem informasi keuangan yang diimplementasikan dan dilaksanakan pemeliharaan	8	267.578.500	
5	02	02	2.05.03	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan	1	245.642.000	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan	1	245.642.000	

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		peningkatan penerapan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan			Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		peningkatan penerapan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan			
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bojonegoro	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	1,697,503,339	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bojonegoro	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	1,697,503,339	
5	02	03	2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Persentase SKPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	100	1.697.503.339	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Persentase SKPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	100	1.697.503.339	
5	02	03	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Bojonegoro	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun tepat waktu	1		Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Bojonegoro	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun tepat waktu	1		
5	02	03	2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah okumen standar satuan barang dan kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	2		Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah okumen standar satuan barang dan kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	2		
5	02	03	2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang disusun tepat waktu	2	91.416.600	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang disusun tepat waktu	2	91.416.600	
5	02	03	2.01.04	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen kebijakan barang milik daerah yang sesuai ketentuan	1	83.250.000	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah dokumen kebijakan barang milik daerah yang sesuai ketentuan	1	83.250.000	
5	02	03	2.01.05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah pedoman Penataan barang milik daerah yang ditetapkan tepat waktu	1	326.657.735	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah pedoman Penataan barang milik daerah yang ditetapkan tepat waktu	1	326.657.735	
5	02	03	2.01.06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bojonegoro	persentase BMD yang diinventarisir tepat waktu	100		Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bojonegoro	persentase BMD yang diinventarisir tepat waktu	100		
5	02	03	2.01.07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Persentase Pengajuan Sertifikasi Tanah Milik Pemda ke BPN yang difasilitasi	100	594.290.000	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Persentase Pengajuan Sertifikasi Tanah Milik Pemda ke BPN yang difasilitasi	100	594.290.000	
5	02	03	2.01.08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah barang milik daerah yang dinilai tepat waktu	200	166.060.000	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah barang milik daerah yang dinilai tepat waktu	200	166.060.000	
5	02	03	2.01.09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah BMD yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pengelolaannya	1000		Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Jumlah BMD yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pengelolaannya	1000		
5	02	03	2.01.10	Sub Kegiatan Optimalisasi	Bojonegoro	Jumlah BMD yang	100	256.844.480	Sub Kegiatan Optimalisasi	Bojonegoro	Jumlah BMD yang	100	256.844.480	

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		dipindahtanggankan, dimusnahkan dan dihapus			Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		dipindahtanggankan, dimusnahkan dan dihapus			
5	02	03	2.01.11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	2	101.234.524	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	2	101.234.524	
5	02	03	2.01.12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	2		Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	2		
5	02	03	2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan BMD	2	77.750.000	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bojonegoro	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan BMD	2	77.750.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bidang keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro selalu berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi BPKAD sebagai fungsi penunjang di bidang keuangan maka tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM dan lainnya.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : BPKAD

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

2.6 Penyeragaman Program dan Kegiatan dengan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan

Selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bidang keuangan maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro hanya berupa rutinitas. Sehubungan dengan hal tersebut maka tidak terdapat penyeragaman atau sinkronisasi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.

2.7 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Antar Perangkat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran Sesuai dengan Kewenangan dan Sinergitas Pelaksanaan

Dalam penyusunan program dan Kegiatan di SKPD menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro, berkaitan dengan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, yaitu sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bidang keuangan maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro hanya berupa rutinitas sehingga tidak terdapat penyesuaian antar Perangkat Daerah karena tidak terdapat tumpang tindih kegiatan. Selain berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD dalam penganggaran juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan pembangunan tahun 2024 yaitu ***Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong***. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas (Prioritas Nasional/PN) dengan sasaran sebagai berikut:

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ditujukan pada “***Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong***”, dengan prioritas pembangunan daerah diarahkan pada :

1. Mengentaskan Kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;

3. Pendidikan dan Kesehatan Gratis Berkualitas;
4. Membangun infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah terpadu dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar;
5. Membangun karakter masyarakat berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;
6. Memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani;
7. Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, Koperasi BUMDes dan Mendorong Terciptanya Desa Mandiri;
8. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan anti korupsi;
9. Mewujudkan harmoni sosia, alam dan lingkungan hidup serta melestarikan kebudayaan dan mengembangkan budaya olah raga.

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
5. Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
6. Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif

3. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor migas dan non migas
5. Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan

Tabel 3.1.
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran antara RPJMN 2020 – 2024 dengan RPD Kabupaten Bojonegoro 2024 – 2026

No	RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024	RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
	7 (Tujuh) Agenda Pembangunan	Tujuan
1	Agenda Ke-7. Kondisi POLHUKHANKAM yang Kondusif <ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan regulasi - Penyederhanaan birokrasi - Stabilitas politik dan pertahanan keamanan 	Tujuan 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib
		Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif
2	Agenda Ke-3: SDM berkualitas dan berdaya saing Agenda Ke-4: Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	Tujuan 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan
3	Agenda Ke-1: Transformasi ekonomi Agenda Ke-3: SDM berkualitas dan berdaya saing	Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor migas dan non migas
4	Agenda Ke-2: Wilayah sebagai basis pembangunan Agenda Ke-5: Pembangunan infrastruktur	Tujuan 5: Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan

Tabel 3.2.

**Penyelarasan Tujuan dan Sasaran antara RPJMD Jawa Timur
2019 – 2024 dengan RPD Kabupaten Bojonegoro 2024 – 2026**

No	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024	RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
1	Tujuan Misi 3 6) Terwujudnya Pemerintahan yang Baik 7) Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.	Tujuan 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung
2	Tujuan Misi 2 2) Menurunnya Angka Kemiskinan 3) Meningkatnya Kesetaraan Gender 4) Terpenuhinya Kebutuhan Dasar 5) Menurunnya Pengangguran	Tujuan 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan
3	Tujuan Misi 1 1) Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah	Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor migas dan non migas
4	Tujuan Misi 1 1) Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah Tujuan Misi 4 8) Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Tujuan 5: Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja BPKAD

Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). Proses penyusunan Renja PD mengacu pada dokumen RKPD sehingga Renja juga harus selaras dengan dokumen RPD.

Tujuan dan sasaran Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024 , adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 3.4
Penyelarasan Tujuan RPD Kabupaten Bojonegoro 2024-2026 dengan Renstra BPKAD

No	RPD	Renstra BPKAD
	Tujuan 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif	Tujuan renstra BPKAD: Meningkatnya Kinerja pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5

Sasaran dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pendanaan
	BIDANG URUSAN KEUANGAN	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	APBD
				Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	APBD
				Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	APBD

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	APBD
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	APBD
				Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan-Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	APBD
				Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD
				Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	APBD

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	APBD
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	APBD
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	APBD
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	APBD
				Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	APBD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
		1		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD
					APBD

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	APBD
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	APBD
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	APBD
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	APBD
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	APBD
				Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	APBD
			Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	APBD
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	APBD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025 pada BPKAD
Kabupaten Bojonegoro

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.404.365.480.876		-		1.566.334.095.385				
5	BIDANG URUSAN KEUANGAN						-						
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Bojonegoro	100		10,470,564,836	APBD	-	100	9.144.254.103
5	02	01	2.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Bojonegoro	7		523,794,075	APBD	-	7	531.928.512
5	02	01	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	Bojonegoro	1		6.696.460	APBD	-	1	6.696.460
5	02	01	2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Bojonegoro	11		6.242.540	APBD	-	11	6.242.540
5	02	01	2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang tersusun	Bojonegoro	11		6.668.840	APBD	-	11	6.668.840
5	02	01	2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Bojonegoro	11		6.441.590	APBD	-	11	6.441.590
5	02	01	2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang tersusun	Bojonegoro	11		6.714.710	APBD	-	11	6.714.710
5	02	01	2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bojonegoro	3		97.723,690	APBD	-	3	98.097.127
5	02	01	2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun	Bojonegoro	12		393.306.245	APBD	-	12	401.067.245
5	02	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi	Bojonegoro	8		8,302,196,716	APBD	-	8	6.975.621.777
5	02	01	2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bojonegoro	12		7,797,158,406	APBD	-	12	6.438.933.467
5	02	01	2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan pengelolaan keuangan yang terpenuhi	Bojonegoro	12		481,164,000	APBD	-	12	512.814.000
5	02	01	2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase SPP/SPM yang diverifikasi	Bojonegoro	100		3.323.590	APBD	-	100	3.323.590

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	01	2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	Bojonegoro	1	2.651.000	APBD	-	1	2.651.000
5	02	01	2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun yang disusun	Bojonegoro	1	2.701.000	APBD	-	1	2.701.000
5	02	01	2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan yang disusun	Bojonegoro	1	1.984.300	APBD	-	1	1.984.300
5	02	01	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Bojonegoro	1	11.651.950	APBD	-	1	11.651.950
5	02	01	2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	Bojonegoro	2	1.562.470	APBD	-	2	1.562.470
5	02	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	Bojonegoro	1	278,229,900	APBD	-	1	260.545.531
5	02	01	2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun	Bojonegoro	1	278,229,900	APBD	-	1	260.545.531
5	02	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	Bojonegoro	12	207.416.110	APBD	-	12	211.130.150
5	02	01	2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik yang dilaksanakan	Bojonegoro	12	10,344,360	APBD	-	12	10.344.360
5	02	01	2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bojonegoro	12	129,341,960	APBD	-	12	132.122.200
5	02	01	2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Bojonegoro	12	25,507,090	APBD	-	12	26.440.890
5	02	01	2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan yang	Bojonegoro	12	8.962.700	APBD	-	12	8.962.700
5	02	01	2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Bojonegoro	12	5.130.000	APBD	-	12	5.130.000
5	02	01	2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pelaksanaan penataan arsip	Bojonegoro	12	28.130.000	APBD	-	12	28.130.000
5	02	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Bojonegoro	12	609,461,485	APBD	-	12	614.550.285
5	02	01	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	Bojonegoro	12	26.346.585	APBD	-	12	26.346.585
5	02	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bojonegoro	12	140.056.800	APBD	-	12	140.056.800
5	02	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bojonegoro	12	443,058,100	APBD	-	12	447.258.100
5	02	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Bojonegoro	12	549,466,550	APBD	-	12	550.477.848

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	01	2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan yang disediakan	Bojonegoro	12	251,778,650	APBD	-	12	251.778.750
5	02	01	2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan mesin yang disediakan	Bojonegoro	12	147.687.500	APBD	-	12	148.699.098
5	02	01	2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor yang disediakan	Bojonegoro	12	150,000,400	APBD	-	12	150.000.000
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	Bojonegoro	100	1,395,003,079,684	APBD	-	100	1.555.445.062.806
					Persentase SKPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan perencanaan	Bojonegoro	100		APBD	-	100	
					Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Bojonegoro	100		APBD	-	100	
5	02	02	2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan	Bojonegoro	100	1,530,647,450	APBD	-	100	1.533.887.100
5	02	02	2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	Bojonegoro	2	60,327,100	APBD	-	2	60.327.100
5	02	02	2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Bojonegoro	2	45.518.600	APBD	-	2	45.518.600
5	02	02	2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD menyelesaikan dokumen RKA tepat waktu	Bojonegoro	74	46.439.900	APBD	-	74	46.439.900
5	02	02	2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang menyusun DPA tepat waktu	Bojonegoro	74	31.505.500	APBD	-	74	31.505.500
5	02	02	2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	Bojonegoro	74	10.189.400	APBD	-	74	10.189.400
5	02	02	2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	Bojonegoro	74	10.189.400	APBD	-	74	10.189.400
5	02	02	2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	240	192.571.700	APBD	-	240	192.571.700

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	02	2.01.08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	480	246.742.500	APBD	-	480	233.647.500
5	02	02	2.01.09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	24	810.469.500	APBD	-	24	826.469.500
5	02	02	2.01.10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang dilaksanakan	Bojonegoro	2	2.624,200	APBD	-	2	3.880.550
5	02	02	2.01.11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan	Bojonegoro	2	3,727,550	APBD	-	2	2.532.750
5	02	02	2.01.12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pembiayaan yang dilaksanakan	Bojonegoro	2	2,563,100	APBD	-	2	2.501.550
5	02	02	2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasubag prolap/ PPTK/KPA yang dibina tentang penganggaran Daerah	Bojonegoro	74	67,779,000	APBD	-	74	68.013.150
5	02	02	2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	Bojonegoro	100	1,108,681,190	APBD	-	100	1.090.134.815
5	02	02	2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi kebutuhan kas yang difasilitasi	Bojonegoro	2	223,998,850	APBD	-	2	208.998.850
5	02	02	2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah data silpa berdasarkan sumber dana yang dilaporkan tepat waktu	Bojonegoro	2		APBD	-	2	
5	02	02	2.02.03	Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD SKPD yang disiapkan tepat waktu	Bojonegoro	148	82,294,000	APBD	-	148	47.294.000
5	02	02	2.02.04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah kajian Pembiayaan Daerah yang disusun	Bojonegoro	1		APBD	-	1	
5	02	02	2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan Penatausahaan Dana Transfer lainnya tepat waktu	Bojonegoro	12	61.534.140	APBD	-	12	61.534.140
5	02	02	2.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan transaksi non tunai	Bojonegoro	1	229,769,680	APBD	-	1	262.519.680

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	02	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah tepat waktu	Bojonegoro	12	202.089.380	APBD	-	12	202.089.380
5	02	02	2.02.08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan Penatausahaan Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah tepat waktu	Bojonegoro	1		APBD	-	1	
5	02	02	2.02.09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi data pembayaran pajak pusat	Bojonegoro	2		APBD	-	2	
5	02	02	2.02.10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang di terbitkan tepat waktu	Bojonegoro	1		APBD	-	1	
5	02	02	2.02.11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan Penatausahaan Keuangan kepada Bendahara Pengeluaran	Bojonegoro	24	308.995.140	APBD	-	24	307.698.765
5	02	02	2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai ketentuan	Bojonegoro	100	757.517.403	APBD	-	100	810.978.577
5	02	02	2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bojonegoro	2	125.743.000	APBD	-	2	145.743.000
5	02	02	2.03.02	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah rekonsiliasi dan verifikasi Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Bojonegoro	2	26.520.000	APBD	-	2	26.520.000
5	02	02	2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan dan Semesteran yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	3	48.583.400	APBD	-	3	58.583.400
5	02	02	2.03.04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Keuangan Konsolidasi SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	2	12.210.900	APBD	-	2	22.210.900
5	02	02	2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	Jumlah dokumen Rancangan PERDA dan Rancangan PERBUP Pertanggungjawaban	Bojonegoro	2	316.020,000	APBD	-	2	316.020,000

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

				Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu							
5	02	02	2.03.06	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	2	1.235.400	APBD	-	2	4.696.574
5	02	02	2.03.07	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Prosentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Bojonegoro	70	119.401.900	APBD	-	70	129.401.900
5	02	02	2.03.08	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	2	1.999.000	APBD	-	2	1.999.000
5	02	02	2.03.09	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	1	67.666.700	APBD	-	1	67.666.700
5	02	02	2.03.10	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	1	8.334.103	APBD	-	1	8.334.103
5	02	02	2.03.11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan	Bojonegoro	4	27.052.000	APBD	-	4	27.052.000
5	02	02	2.03.12	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten yang dilaksanakan	Bojonegoro	4	1.252.000	APBD	-	4	1.252.000
5	02	02	2.03.13	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	1	1.499.000	APBD	-	1	1.499.000
5	02	02	2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	Bojonegoro	100	1,390,856,513,141	APBD	-	100	1.551.260.953.199
5	02	02	2.04.02	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen analisis investasi yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	1	363,706,070	APBD	-	1	463.706.070
5	02	02	2.04.08	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase bantuan Keuangan yang disalurkan tepat waktu	Bojonegoro	100	1,284,962,078,440	APBD	-	100	1.440.501.024.320

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	02	2.04.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	persentase Belanja Tidak Terduga yang disalurkan tepat waktu	Bojonegoro	100	81,053,054,670	APBD	-	100	86.425.542.750
5	02	02	2.04.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	persentase Belanja Transfer yang disalurkan tepat waktu	Bojonegoro	100	24,477,673,961	APBD	-	100	23.870.680.059
5	02	02	2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	Bojonegoro	100	749,720,500	APBD	-	100	749.109.115
5	02	02	2.05.01	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan data keuangan yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	8	236,500,000	APBD	-	8	237.595.000
5	02	02	2.05.02	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang diimplementasikan dan dilaksanakan pemeliharaan	Bojonegoro	8	267.578.500	APBD	-	8	268.502.855
5	02	02	2.05.03	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan peningkatan penerapan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Bojonegoro	1	245.642.000	APBD	-	1	243.011.260
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Bojonegoro	100	1,697,503,339	APBD	-	100	1.744.778.476
5	02	03	2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	Bojonegoro	100	1.697.503.339	APBD	-	100	1.744.778.476
5	02	03	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	1		APBD	-	1	
5	02	03	2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah okumen standar satuan barang dan kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	2		APBD	-	2	
5	02	03	2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	2	91.416.600	APBD	-	2	91.416.600
5	02	03	2.01.04	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kebijakan barang milik daerah yang sesuai ketentuan	Bojonegoro	1	83.250.000	APBD	-	1	83.250.000
5	02	03	2.01.05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pedoman Penataan barang milik daerah yang ditetapkan tepat waktu	Bojonegoro	1	326.657.735	APBD	-	1	279.157.885
5	02	03	2.01.06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	persentase BMD yang diinventarisir tepat waktu	Bojonegoro	100		APBD	-	100	94.774.987
5	02	03	2.01.07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Pengajuan Sertifikasi Tanah Milik Pemda ke BPN yang difasilitasi	Bojonegoro	100	594.290.000	APBD	-	100	594.290.000
5	02	03	2.01.08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dinilai tepat waktu	Bojonegoro	200	166.060.000	APBD	-	200	166.060.000

BPKAD Kabupaten Bojonegoro

5	02	03	2.01.09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pengelolaannya	Bojonegoro	1000		APBD	-	1000	23.750.000
5	02	03	2.01.10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtangkan, dimusnahkan dan dihapus	Bojonegoro	100	256.844.480	APBD	-	100	256.844.480
5	02	03	2.01.11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	Bojonegoro	2	101.234.524	APBD	-	2	101.234.524
5	02	03	2.01.12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Bojonegoro	2		APBD	-	2	
5	02	03	2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan BMD	Bojonegoro	2	77.750.000	APBD	-	2	54.000.000

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Daerah Kabupaten Bojonegoro

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu mengoordinasikan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak secara langsung mendukung Prioritas Kabupaten Bojonegoro namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Kabupaten Bojonegoro dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan yang bertujuan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, dalam rangka mendukung tercapainya target dan sasaran pembangunan di Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro. Selain hal tersebut, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 juga merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah dan rencana ke depan sesuai ketentuan perundang-undangan serta kemampuan sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja BPKAD sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk :

1. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaannya;
2. merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro;
3. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
4. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun;
5. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024, maka rencana tindak lanjut untuk pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola

- keuangan mulai penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar aparatur dan antar perangkat daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan tepat;
 3. Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bojonegoro, 11 Agustus 2023
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**
Kabupaten Bojonegoro



LULUK ALIFAH
Pembina Tingkat I
NIP.19691128 200312 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881259
BOJONEGORO, Kode Pos 62111

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

NOMOR : 188/33 /KEP/412.303/2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang diartikan sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

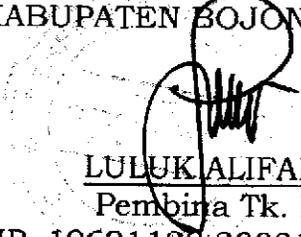
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini.
- KEDUA : Tim penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas secara bertanggungjawab dalam menyiapkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal **24** Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO



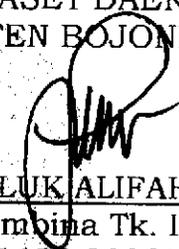
LULUK ALIFAH
Pembina Tk. I
NIP. 19691128 200312 2 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 33 /412.303/2023
TANGGAL : 29 Januari 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan
1	Pengarah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro
2	Ketua	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro
3	Sekretaris	Sub Koordinator Analisis Kebijakan Ahli Muda
4	Anggota	a. Kepala Bidang Anggaran; b. Kepala Bidang Akuntansi dan Investasi; c. Kepala Bidang Perbendaharaan; d. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah; e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; f. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I; g. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II; h. Kepala Sub Bidang Akuntansi; i. Kepala Sub Bidang Investasi; j. Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji; k. Kepala Sub Bidang Belanja Gaji dan Pengelolaan Kas Daerah; l. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan; m. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan; n. Sub Koordinator Analisis Anggaran Ahli Muda; o. Sub Koordinator Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; p. Sub Koordinator Penilai Pemerintah Ahli Muda

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO


LULUK ALIFAH

Pembina Tk. I

NIP. 19691128 200312 2 008